

Implementasi Program Nagari Bersekolah Di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Komparatif Nagari Painan dan Nagari Pancung Taba)

Regil Aurel¹, Adil Mubarak²

^{1,2} Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Nagari Bersekolah (Pronasa) di Kabupaten Pesisir Selatan dengan membandingkan implementasi di Nagari Painan dan Nagari Pancung Taba. Latar belakang penelitian ini adalah perbedaan hasil implementasi Pronasa antara nagari yang terletak di ibu kota kabupaten yaitu Nagari Painan dan nagari yang jauh dari ibu kota kabupaten yaitu Nagari Pancung Taba. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi komparatif. Data-data yang diperoleh dikumpulkan melalui proses wawancara dan observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pronasa di nagari yang berada di ibu kota kabupaten dan nagari yang jauh dari ibu kota kabupaten sama-sama belum berjalan dengan optimal karena komunikasi dari pembuat kebijakan belum menjangkau semua pihak yang terlibat dalam implementasi Pronasa yang berakibat pada tidak adanya kolaborasi antara sekolah dengan pemerintah nagari.

Kata Kunci: Kebijakan; Implementasi Program; Program Nagari Bersekolah (Pronasa).

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.146>

*Correspondence: Regil Aurel

Email: regilaurel.02@gmail.com

Received: 08-06-2024

Accepted: 18-07-2024

Published: 04-08-2024

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *This research aims to analyze the implementation of the Nagari Schooling Program (Pronasa) in Pesisir Selatan Regency by comparing implementation in Nagari Painan and Nagari Pancung Taba. The background to this research is the difference in the results of implementing Pronasa between the nagari located in the district capital, namely Nagari Painan, and the nagari which is far from the district capital, namely Nagari Pancung Taba. The research method used is descriptive research with a qualitative approach through comparative studies. The data obtained was collected through the process of interviews, observation and documentation. The results of the research show that the implementation of Pronasa in nagari which is in the district capital and nagari which are far from the district capital have not yet run optimally because communication from policy makers has not reached all parties involved in the implementation of Pronasa which has resulted in the absence of collaboration between schools with the nagari government.*

Keyword: *Policy, Program Implementation, Nagari School Program.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Berdasarkan data situs statistik *real-time* Worldometers, jumlah penduduk di Indonesia telah menembus 279 juta jiwa pada 13 maret 2024. Namun, jumlah penduduk yang banyak tersebut tidak diiringi dengan kualitas pembangunan manusia yang baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2021 mendapat skor 0,705 yang menduduki peringkat ke 114 di dunia (Badan Pusat Statistik, 2024).

Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran capaian dimensi utama pembangunan manusia (BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024). Terdapat tiga komponen yang menjadi dasar perhitungan IPM yaitu; pengetahuan, umur panjang dan hidup sehat, serta standar hidup yang layak. Pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah adalah harapan lamanya (tahun) anak berumur 7 tahun akan bersekolah. Rata-Rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai rata-rata lamanya (tahun) pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas.

Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan angka IPM di bawah rata-rata nasional yaitu 72,24. Kualitas pendidikannya tergambar melalui angka Harapan Lama Sekolah (LHS) dan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Harapan Lama Sekolah di Pesisir Selatan sebesar 13,36 tahun pada 2023 sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah di Pesisir Selatan sebesar 8,58 tahun pada 2023 (BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024). Ini berarti anak-anak di Pesisir Selatan yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan hingga Diploma 1. Namun, rata-rata penduduk Pesisir Selatan berusia 25 tahun ke atas hanya menempuh pendidikan hingga kelas IX. Ketimpangan antara harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa pendidikan di Pesisir Selatan belum mencapai target, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas sumberdaya daya manusia, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan. Hal ini dimuat dalam misi kelima

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan yaitu mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.

Dalam rangka melaksanakan misi kelima RPJMD, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan Program Nagari Bersekolah (Pronasa). Untuk mendukung pelaksanaan Pronasa sudah dikeluarkan beberapa keputusan, yaitu Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 810/06/Kpts/BPT-PS/2023 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Penyelenggaraan Program Nagari Bersekolah (Pronasa) Tahun 2023 dan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 420/6037/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Tentang Program Nagari Bersekolah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 yang hingga hari ini tim tersebut masih merancang dan melewati proses untuk melahirkan perda tentang Pronasa.

Program Nagari Bersekolah adalah inovasi dalam menggali dan mengembangkan potensi peserta didik Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai minat dan bakatnya dengan konsep kolaborasi antara sekolah, pemerintah nagari, kelompok komunitas keahlian, orang tua, dan masyarakat berbasis nagari. Program Nagari Bersekolah tidak berada dibawah kewenangan pemerintah nagari secara mutlak. Nagari berperan dalam memfasilitasi dan berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah administratifnya. Terdapat 5 bidang kegiatan komunitas pengembangan diri peserta didik, yaitu bidang olahraga, bidang budaya, bidang keagamaan, bidang sains, dan bidang literasi.

Sejak diresmikan pada bulan Mei 2023, Program Nagari Bersekolah telah berjalan di nagari-nagari di Kabupaten Pesisir Selatan. Dari total 182 nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, 91 nagari telah melaksanakan Pronasa. Akan tetapi, pendataan yang dilakukan belum lengkap karena dari total 15 kecamatan yang ada, terdapat 3 kecamatan yang belum terdata yaitu kecamatan IV Jurai, kecamatan Sutera, dan kecamatan Basa Ampek Hulu Tapan.

Kondisi geografis Kabupaten Pesisir Selatan yang memanjang dari utara ke selatan dengan luas wilayah sekitar 6.049,33 km² mengakibatkan jarak yang jauh dari kecamatan menuju ibu kota kabupaten. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan penelitian ini pada nagari yang berada di ibu kota kabupaten dan yang jauh dari ibu kota kabupaten. Dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, peneliti hanya mampu melakukan penelitian di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.

Untuk mengetahui implementasi Pronasa pada nagari yang berada di ibu kota kabupaten dan nagari yang jauh dari ibu kota kabupaten, peneliti telah melakukan observasi lapangan pada dua nagari, yaitu Nagari Painan dan Nagari Pancung Taba. Kedua nagari ini memiliki persamaan, yaitu berada di wilayah administratif yang sama dan mulai melaksanakan Pronasa sejak bulan Mei 2023. Nagari Painan yang terletak di Kecamatan IV Jurai memiliki dua Sekolah Dasar (SD) dan satu Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu SDN 23 Painan Utara, SDN 13 Painan Utara, dan SMPN 1 Painan. Kegiatan Pronasa di nagari yang berada di ibu kota kabupaten ini telah mencapai sasaran yang diharapkan. Hal ini dibuktikan dengan telah terpenuhinya sasaran Pronasa baik bagi peserta didik SD maupun peserta didik SMP. Kegiatan magrib mengaji dan subuh berjamaah dilaksanakan di masjid dan mushola terdekat dari tempat tinggal dengan kolaborasi antara SD dan SMP. Selain itu juga terdapat komunitas tari tradisional dan modern, komunitas randai, komunitas olah raga bola kaki, dan komunitas matematika dan ipa yang dilaksanakan oleh SD. SMPN 1 Painan juga memiliki beberapa program pengembangan kreativitas peserta didik, seperti kegiatan tahfiz, musik, tari, sepak bola, senam, puisi, vocal grup dan solo song, serta randai. Meskipun target pelaksanaan Pronasa telah terpenuhi, kolaborasi antara SD dan SMP serta pemerintah nagari di Nagari Painan masih perlu ditingkatkan.

Nagari Pancung Taba terletak di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara memiliki satu SD dan satu Madrasah Tsanawiyah (MTS), yaitu SDN 03 Pancung Taba dan MTSS H. Zakaria. Kegiatan Pronasa di nagari yang jauh dari ibu kota kabupaten ini belum mencapai sasaran yang diharapkan. Kegiatan yang pernah diselenggarakan adalah subuh berjamaah, maghrib mengaji, serta pelatihan matematika dan IPA. Kegiatan subuh berjamaah hanya dilaksanakan di Bulan Ramadhan, sedangkan kegiatan pelatihan matematika dan IPA tidak berlanjut, sehingga hanya terdapat 1 kegiatan komunitas yaitu magrib mengaji. Padahal setiap peserta didik SD kelas tinggi (kelas 4-6) dan peserta didik SMP wajib mengikuti minimal 2 (dua) program. Oleh sebab itu, target pelaksanaan Pronasa belum terpenuhi. Konsep kolaborasi berbasis nagari juga belum optimal. Kegiatan Pronasa hanya digagas oleh sekolah tanpa berkolaborasi dengan pemerintah nagari, masyarakat, maupun kelompok komunitas keahlian. Dengan hanya ada satu kegiatan komunitas magrib mengaji

yang sebelum diluncurkannya Pronasa juga telah ada dan diikuti oleh peserta didik SD dan SMP, tujuan pelaksanaan Pronasa yaitu meningkatkan kompetensi dan karakter peserta didik masih sulit untuk dicapai.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis perbandingan implementasi Program Nagari Bersekolah di Nagari Painan dengan Nagari Pancung Taba dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Nagari Bersekolah di Kabupaten Pesisir Selatan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi komparatif. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang perbedaan atau persamaan implementasi Pronasa di Nagari Painan dan Nagari Pancung Taba (Sugiyono, 2013). Penelitian ini dilakukan di Nagari Painan Kecamatan IV Jurai dan Nagari Pancung Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Penyelenggara Pronasa serta *stakeholder* dan sasaran Pronasa di Nagari Painan dan Nagari Pancung Taba. Data-data yang diperoleh dikumpulkan melalui proses wawancara dan observasi serta dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan metode interaktif mencakup proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Paendong et al., 2023).

Hasil dan Pembahasan

1. Perbandingan Implementasi Program Nagari Bersekolah di Nagari Painan dan Nagari Pancung Taba

Berdasarkan data yang diperoleh dari kedua nagari, untuk memudahkan pemahaman terkait implementasi Pronasa di Nagari Painan dan Nagari Pancung Taba, perbandingannya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Implementasi Pronasa di Nagari Painan dan Nagari Pancung Taba

| No. | Indikator Perbandingan | Nagari Painan | Nagari Pancung Taba |
|------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
|------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|

| | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Program | <p>Bidang agama, budaya, dan sains.</p> <p>a. SMP dan SD; subuh berjamaah.</p> <p>b. SD se-gugus 1; randai, sepak bola, silat, dan karate.</p> <p>c. SMP 1 Painan; marching band, tahfiz, KSN IPA, KSN IPS, KSN Matematika, story telling, speech contest, puisi, cerpen, debat, paduan suara dan solo song, , sepak bola, renang, tari, dan randai.</p> <p>d. SDN 23 Painan Utara; KSN IPA, KSN renang, FLS2N pantomim, tari, nasyid, drum band, dan tari.</p> <p>e. SDN 13 Painan Utara; Randai, KSN IPA, KSN matematika, tahfiz, sepak bola, nyanyi, tari, dan pantomim.</p> | <p>Bidang agama.</p> <p>a. SDN 03 Pancung Taba; maghrib mengaji, subuh berjamaah, pelatihan asma'ul husna, tahfidz, dan pembacaan ayat-ayat pendek.</p> |
| 2. Kolaborasi | SD dan SMP, SD se-gugus 1, sekolah dan kelompok komunitas keahlian | tidak ada, hanya SD 03 Pancung Tebal |
| 3. Pelatih | Guru dan kelompok komunitas | Guru |
| 4. Pembina kegiatan | Guru berdasarkan SK Kepala Sekolah | Guru |
| 5. Fasilitas Pronasa | Sekolah masing-masing | Sekolah masing-masing |
| 6. Dana | Bosda | Bosda |

| | | | |
|----|--------------------|--|--|
| 7. | Kegiatan di nagari | Sanggar seni dan club bola kaki (swasta) | Seni baca Al-quran, pelatihan khatib jum'at. |
|----|--------------------|--|--|

Sumber: Data primer diolah, 2024

Perbandingan implementasi Program Nagari Bersekolah di Nagari Painan dan Nagari Pancung Taba akan dianalisis dengan menggunakan model implementasi George C. Edward III. Model implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III terdiri dari empat variabel (Anggara, 2018). Keempat variabel ini saling mempengaruhi dan saling berhubungan satu sama lain dalam menentukan kegagalan atau keberhasilan implementasi. Variabel yang dimaksud adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Terdapat 3 indikator penting dalam komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi merupakan saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan publik atau program kepada para pelaksana. Program Nagari Bersekolah (Pronasa) telah ditransmisikan oleh tim penyelenggara Pronasa Kabupaten Pesisir Selatan kepada stakeholder melalui kegiatan peluncuran, sosialisasi, surat edaran, dan pemberitaan media. Pelaksana Pronasa Nagari Painan dan Nagari Pancung Taba telah menerima informasi tentang Pronasa. Akan tetapi komunikasi yang dilakukan tidak menjangkau semua pelaksana, pemerintah Nagari Painan kurang memahami informasinya, sedangkan Pemerintah Nagari Pancung Taba sama sekali tidak mendapatkan informasi.

Kedua, kejelasan informasi tentang tujuan atau pun tata cara pelaksanaan program. Informasi tentang Pronasa belum diketahui dengan jelas oleh semua stakeholder terutama pemerintah nagari, baik itu Nagari Painan ataupun Nagari Pancung Taba. Sementara sekolah yang ada di kedua nagari, secara umum telah mengetahui informasi tentang tujuan ataupun prosedur pelaksanaan Pronasa. Namun, ada beberapa kekeliruan informasi yang dipahami oleh Kepala MTSs Haji Zakaria Pancung Tebal.

Ketiga konsistensi informasi, hal ini agar pelaksana tidak mengalami kebingungan dalam mengimplementasikan program. Komunikasi tentang Pronasa bersifat

konsisten. Informasinya sama baik bagi sekolah di Nagari Painan maupun sekolah di Nagari Pancung Taba. Perubahan dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas Pronasa, seperti kegiatan pesantren Ramadhan dan kegiatan Aktualisasi Pronasa. Informasinya masih sejalan dengan informasi awal, sehingga pelaksana tidak mengalami kebingungan dalam implementasinya.

Berdasarkan indikator komunikasi, komunikasi terkait Pronasa belum dilaksanakan dengan baik. Pihak-pihak yang seharusnya terlibat, tidak mengetahui informasi tentang program yang akan dilaksanakan. Hal inilah yang mengakibatkan belum optimal implementasi Pronasa di Nagari Painan dan Nagari Pancung Taba. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Kusnadi & Baihaqi, 2020) syarat keberhasilan implementasi kebijakan adalah implementor mengetahui tujuan dan sasaran kebijakan serta apa yang harus dilakukan. Sehingga tidak mengherankan jika Pronasa belum terimplementasi dengan optimal.

b. Sumber Daya

Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan publik diperlukan sumber daya yang memadai, meliputi staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Pertama staf, yaitu sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan program. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pronasa adalah pembina dan pelatih kelompok belajar, pembinanya adalah guru sekolah dan pelatih bisa dari guru atau kelompok komunitas keahlian. Untuk sumber daya manusia, Nagari Painan telah memiliki pelatih yang berkompeten dengan memberdayakan guru serta menjalin kerjasama dengan kelompok komunitas keahlian. Sedangkan di Nagari Pancung Taba, pelatihnya adalah guru bidang studi, sekolah tidak mampu mendatangkan pelatih dari kelompok komunitas keahlian. Dengan hanya menggunakan guru yang tentu saja kemampuannya terbatas akan berdampak pada kualitas program yang dilaksanakan. Pilihan programnya akan terbatas dan jika melaksanakan banyak kegiatan hasilnya tidak maksimal.

Kedua informasi, yaitu informasi tentang data-data yang berkaitan dengan kebijakan yang dilaksanakan. Program Nagari Bersekolah telah didukung dengan aplikasi Pronasa yang berfungsi sebagai sarana informasi pemantauan pelaksanaan Pronasa di Pesisir Selatan. Melalui aplikasi Pronasa dapat diketahui sekolah-sekolah mana yang telah melaksanakan Pronasa, apa saja programnya, dan siapa siswa yang

mengikutinya. Penggunaan aplikasi pronasa di Nagari Painan dan Nagari Pancung Taba belum optimal. Sekolah tidak melakukan update data secara berkala terkait program-program yang dilaksanakannya. Aplikasi yang berfungsi sebagai sarana informasi belum mampu memberikan informasi yang lengkap tentang pelaksanaan Pronasa di Kabupaten Pesisir Selatan.

Ketiga kewenangan, yaitu kewenangan yang dimiliki pelaksana agar dapat mengimplementasi program dengan baik. Pelaksana yaitu sekolah di Nagari Painan dan Nagari Pancung Taba diberikan kewenangan untuk menentukan sendiri kegiatan/kelompok belajar yang akan dibentuknya. Selain itu juga diberikan kewenangan untuk menggunakan dana bos atau dana bosda untuk membiayai kegiatan Pronasa. Kebebasan yang diberikan bisa berdampak positif dan negatif. Positifnya sekolah bisa menentukan sendiri kegiatan kelompok belajar yang akan dibentuknya dengan mengukur kesanggupan baik dari segi sumber daya manusia atau fasilitas sekolah. Hal ini akan membawa dampak negatif berupa terbatasnya kegiatan yang dilaksanakan. Seperti di Nagari Pancung Taba yang sekolahnya memiliki keterbatasan terkait sumber daya manusia maupun fasilitas hanya melaksanakan kegiatan di bidang keagamaan. Sedangkan Nagari Painan yang fasilitas sekolahnya sudah lengkap dan mampu untuk mendatangkan pelatih dari luar sekolah, memiliki banyak kegiatan dari berbagai bidang.

Keempat fasilitas, yaitu fasilitas fisik berupa sarana dan prasarana yang diperlukan dalam implementasi kebijakan. Fasilitas fisik yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan Pronasa berasal dari sekolah masing-masing. Jika sekolah memilih kegiatan sesuai dengan kemampuannya, tentu fasilitas fisik sekolah sudah memadai. Kemudian jika sekolah ingin membentuk kelompok belajar yang baru, fasilitas yang dibutuhkan dapat dilengkapi menggunakan dana bos. Sekolah di Nagari Painan telah memiliki fasilitas untuk berbagai kegiatan karena sebelumnya sekolah juga sudah mengadakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, sehingga tidak ditemukan kendala yang berarti terkait fasilitas. Akan tetapi sekolah di Nagari Pancung Taba yang sebelumnya tidak memiliki ekstrakurikuler, belum mempunyai fasilitas pendukung untuk kegiatan Pronasa di bidang olahraga dan budaya. Hal ini mengakibatkan terbatasnya pilihan kegiatan yang akan dibentuk, yaitu hanya kegiatan yang tidak membutuhkan fasilitas tambahan.

Pada dasarnya fasilitas bisa dilengkapi dengan menggunakan dana bos atau menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah nagari. Untuk penggunaan dana bos ini sangat bergantung pada prioritas sekolah, apakah sekolah memilih mengalokasikan dana bos untuk melengkapi fasilitas kegiatan pronasa atau untuk biaya lainnya. Faktanya setelah 1 tahun pelaksanaan Pronasa penggunaan dana bos untuk melengkapi fasilitas oleh sekolah di Nagari Pancung Taba bukanlah prioritas dari pihak sekolah. Terkait penggunaan fasilitas nagari, hal ini baru bisa dilaksanakan setelah menjalin kolaborasi dengan pemerintah nagari. Hingga saat ini kolaborasi tersebut belum terlaksana, sehingga fasilitasnya pun belum bisa digunakan.

Berdasarkan indikator sumber daya, Nagari Painan telah memiliki sumber daya yang lengkap dalam mengimplementasikan Pronasa, baik dari sumber daya manusia dan fasilitas. Sedangkan Nagari Pancung Taba dari segi sumber dayanya masih kurang. Padahal menurut Edward III (dalam Vera, 2020) implementasi tidak akan berjalan efektif apabila implementor kekurangan sumber daya. Hal inilah yang terjadi di Nagari Pancung Taba. Dari keempat indikator sumber daya, sumber daya manusia dan fasilitas sangat menentukan kualitas implementasi Pronasa. Jika kekurangan fasilitas, pilihan kegiatan Pronasa yang dilaksanakan juga akan terbatas mengikuti apa yang bisa dilaksanakan saja. Selain itu, guru juga memiliki keterbatasan dalam melatih peserta didik. Untuk kegiatan yang memerlukan keahlian khusus, seperti randai atau karate, sekolah harus menjalin kerjasama dengan komunitas keahlian.

c. Disposisi

Sikap dan komitmen pelaksana dalam implementasi kebijakan merupakan hal yang krusial, tanpa komitmen dari pelaksana kebijakan tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Pelaksana Pronasa di kedua nagari, yaitu Nagari Painan dan Nagari Pancung Taba memiliki pandangan yang sama, bahwa Pronasa adalah program yang bagus yang membawa perubahan positif bagi peserta didik. Selain menyambut Pronasa dengan positif pelaksana juga perlu menunjukkan keseriusannya dalam pelaksanaan program. Pelaksanan di Nagari Painan yaitunya sekolah telah serius dalam implementasi Pronasa dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan pelaksana di Nagari Pancung Taba yaitu sekolah belum menunjukkan keseriusannya. Sekolah tidak melakukan upaya untuk mengatasi keterbatasan yang ada dan bahkan tidak menunjuk pembina kegiatan secara resmi.

Meskipun Pronasa di Nagari Painan kelihatannya telah berjalan dengan baik, terdapat aspek krusial yang perlu diperhatikan yaitu kolaborasi. Program Nagari Bersekolah bukan hanya sekedar kegiatan peserta didik yang dilaksanakan di sekolah tetapi kegiatan peserta didik SD dan SMP berbasis nagari. Kegiatan keagamaan yaitu shubuh berjamaah dan magrib mengaji telah dilaksanakan di nagari oleh gabungan peserta didik SD dan SMP. Namun hanya satu kegiatan di satu bidang, kegiatan lainnya dilaksanakan di sekolah masing-masing. Menurut Bagi dkk. (2023) implementor tidak hanya harus mengetahui informasi tentang kebijakan atau memiliki kemampuan mengimplementasikan kebijakan tetapi juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pelaksana kebijakan di Nagari Painan belum menunjukkan keinginan untuk melaksanakan Pronasa sesuai dengan hakikat program itu sendiri yaitu berkolaborasi berdasarkan nagari.

Hal yang sama juga terjadi di Nagari Pancung Taba, kolaborasi berbasis nagari belum terlaksana, bahkan terdapat sekolah yang bisa dikatakan tidak melaksanakan Pronasa karena komunikasi yang tidak tepat dan tidak jelas sehingga terjadi kesalahpahaman informasi. Sekolah yang telah melaksanakan Pronasa hanya sekedar melaksanakan, tidak menunjukkan keinginan untuk mengoptimalkan kegiatan Pronasa di sekolahnya.

d. Struktur Birokrasi

Faktor yang tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Perlu ada mekanisme kerja yang dibentuk untuk menjalankan suatu kebijakan publik. Pelaksanaan Program Nagari Bersekolah di Kabupaten Pesisir Selatan adalah Tim Penyelenggara Pronasa yaitu Bupati, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan jajarannya. Namun, Camat, Koordinator Kecamatan, Unit Pelayanan Teknis (UPT) satuan Pendidikan SD dan SMP, Pemerintah Nagari tidak masuk dalam struktur penyelenggara Pronasa. Padahal pihak-pihak tersebut adalah pelaksana Pronasa di lapangan yang langsung berhubungan dengan kelompok sasaran yaitu peserta didik.

Hal ini akan menyebabkan koordinasi antara pelaksana tidak berjalan dengan efektif, seperti yang terjadi dengan pemerintah nagari di Nagari Painan dan Nagari Pancung Taba. Informasi yang diterima dari Dinas Pendidikan tidak jelas dan dari Camat juga tidak ada. Menurut Kalsum & Mubarak (2022) meskipun implementor

telah mengetahui apa dan bagaimana mengimplementasikan kebijakan, sumber daya telah mencukupi, implementasi bisa jadi masih belum efektif karena struktur birokrasi yang ada tidak efisien.

Sekolah yang berada di Nagari Painan telah menunjuk pelaksana kegiatan Pronasa dengan mengeluarkan surat keputusan tentang pembina pronasa. Sedangkan sekolah di Nagari Pancung Taba juga telah menunjuk pelaksana kegiatan Pronasa tapi belum berdasarkan surat keputusan resmi. Sebagai institusi formal sekolah hendaknya membentuk pelaksana kegiatan atau pembina kegiatan melalui prosedur formal dengan mengeluarkan surat keputusan kepala sekolah. Hal ini sebagai bentuk keseriusan sekolah dalam mengimplementasikan Pronasa.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Nagari Bersekolah di Kabupaten Pesisir Selatan

Pelaksanaan Pronasa di Kabupaten Pesisir Selatan dipengaruhi oleh kemampuan sekolah dan nagari dalam menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan latihan. Sekolah-sekolah yang berada di Nagari Painan, baik SD maupun SMP telah memiliki berbagai fasilitas untuk kegiatan ekstrakurikuler, sehingga mereka bisa melaksanakan berbagai kegiatan sesuai bidang-bidang Pronasa yang ada, tanpa mengalami hambatan yang berarti terkait dengan fasilitas. Akan tetapi sekolah yang berada di Nagari Pancung Taba sebelumnya tidak memiliki kegiatan ekstrakurikuler, sehingga perlengkapan untuk kegiatan Pronas sangat terbatas. Mereka hanya mampu melaksanakan kegiatan yang tidak membutuhkan peralatan tambahan. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas Program Nagari Bersekolah yang dilaksanakan.

Dana Pronasa yang terbatas juga mempengaruhi implementasi Pronasa, baik untuk kebutuhan perlengkapan maupun biaya pelatihan, khusus untuk nagari yang aksesnya sulit tentu membutuhkan biaya latihan yang lebih besar. Nagari Pancung Taba terletak di daerah perbukitan yang akses jalannya sulit, jarak dengan nagari lain maupun pusat kecamatan cukup jauh, apalagi jarak dengan ibukota kabupaten. Hal ini mengakibatkan Nagari Pancung Taba tidak bisa menghadirkan pelatih dari luar, padahal sumber daya sekolah dan masyarakat nagari sangat terbatas. Selain itu, kegiatan Pronasa yang didanai dengan dana bosda hanya bisa untuk biaya latihan, jika sekolah ingin menambah fasilitas hanya bisa didanai dengan dana bos, sehingga ini menjadi dilema tersendiri bagi sekolah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Pronasa di Nagari Painan dan Nagari Pancung Taba besar kemungkinannya juga dialami oleh nagari-nagari lain di Kabupaten Pesisir Selatan. Nagari Painan yang terletak di ibu kota kabupaten dan Nagari Pancung Taba yang terletak jauh dari ibu kota kabupaten, implementasi Pronasa di kedua nagari sama-sama dipengaruhi oleh fasilitas dan dana kegiatan.

Kesimpulan

Implementasi Program Nagari Bersekolah di Nagari Painan dan Nagari Pancung Taba sama-sama belum berjalan dengan optimal. Akan tetapi, implementasi pronasa di Nagari Painan lebih baik daripada Nagari Pancung Taba. Pemerintah nagari di kedua nagari sama-sama belum menerima informasi yang jelas dan belum terlibat dalam implementasi Pronasa. Sumber daya di Nagari Painan sudah memadai, sedangkan di Nagari Pancung Taba mengalami kendala dari segi sumber daya manusia dan fasilitas. Disposisi pelaksana Pronasa di kedua nagari masih kurang baik, karena belum adanya keinginan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pronasa. Struktur birokrasi Pronasa belum efisien karena tidak melibatkan semua pelaksana.

Pelaksanaan Pronasa di Kabupaten Pesisir Selatan dipengaruhi oleh kemampuan sekolah dan nagari dalam menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan latihan. Dana Pronasa yang terbatas juga mempengaruhi bagaimana Pronasa diimplementasikan, hal ini menyangkut perlengkapan maupun biaya pelatihan, khusus untuk nagari yang aksesnya sulit tentu membutuhkan biaya latihan yang lebih besar.

Daftar Pustaka

Anggara, S. (2018). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.

Badan Pusat Statistik. (2024). Statistika Indonesia 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Bagi, F., Igrisa, I., & Tantu, R. (2023). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), 3362–3372.

- BPS Kabupaten Pesisir Selatan. (2024). Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka. Painan: BPS Kabupaten Pesisir Selatan.
- Kalsum, U., & Mubarak, A. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok. *Journal of Public Administration Studies*, 1(1), 9–21.
- Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 810/06/Kpts/BPT-PS/2023 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Penyelenggaraan Program Nagari Bersekolah (Pronasa) Tahun 2023.
- Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 420/6037/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Tentang Program Nagari Bersekolah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
- Kusnadi, I. H., & Baihaqi, M. R. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal* 2(2): 126-150.
- Paendong, G. A., Lalamentik, O., & Rumagit, M. C. N. (2023). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Warga Miskin di Desa Dondomon Induk Kecamatan Dumoga Utara. *Jurnal Equilibrium*, 4(1), 51–59.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Vera, N. (2020). Implementasi Program Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur. *JISPAR: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 9(1), 23–31.
- Worldometers. Indonesia Population. Diakses pada 13 Maret 2024, dari <https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/>